

Efek Berganda Demokrasi Pada Daya Saing Jawa Barat

Florence Aurelia, Audra Tardas R., M. Daffa Rif'at, M. Razaq Maliki

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Email: florenceaureliaaaa@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks persaingan antarwilayah, peningkatan daya saing daerah menjadi isu strategis di Indonesia. Meskipun Provinsi Jawa Barat mencatat skor tinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), performanya dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) masih tertinggal, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas demokrasi dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tiga dimensi IDI kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan dua belas pilar IDSD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis korelasi bivariat menggunakan data sekunder dari BPS dan BRIN tahun 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebebasan berkorelasi dengan pilar infrastruktur, sistem keuangan, ukuran pasar, dan inovasi. Dimensi kesetaraan berkaitan erat dengan institusi, TIK, keterampilan, dan kesehatan. Sementara itu, kapasitas lembaga demokrasi berpengaruh terhadap institusi dan pelayanan kesehatan. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif dan kuat memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong daya saing daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar.

Kata kunci: demokrasi; daya saing daerah; Jawa Barat

Abstract

In the context of inter-regional competition, increasing regional competitiveness is a strategic issue in Indonesia. Although West Java Province recorded a high score in the Indonesian Democracy Index (IDI), its performance in the Regional Competitiveness Index (IDSD) still lagged, raising questions about the effectiveness of democracy in regional development. This study aims to analyze the relationship between the three dimensions of IDI freedom, equality, and capacity of democratic institutions and the twelve pillars of IDSD. The method used is a descriptive quantitative approach with bivariate correlation analysis using secondary data from BPS and BRIN in 2021–2023. The results show that the dimension of freedom is correlated with the pillars of infrastructure, financial system, market size, and innovation. The equity dimension is closely related to institutions, ICT, skills, and health. Meanwhile, the capacity of democratic institutions affects health institutions and services. These findings confirm that an inclusive and strong democracy has a significant contribution to encouraging regional competitiveness. This research is expected to be the basis for the formulation of sustainable democracy-based development policies at the provincial level.

Keywords: democracy; regional competitiveness; West Java

Manuscript accepted: 27 May 2025

Revised: 30 May 2025

Date of publication: 2 June 2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Persaingan antarwilayah dalam tataran global menuntut setiap negara untuk mengembangkan strategi peningkatan daya saing, tidak hanya secara nasional tetapi juga pada level daerah. World Economic Forum (2023) menekankan bahwa daya saing regional merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam era globalisasi. Bank Dunia (2020) juga menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan kemiskinan secara nasional. Dalam konteks negara berkembang, United Nations Development Programme (UNDP, 2021) menekankan pentingnya integrasi antara desentralisasi, inovasi lokal, dan tata kelola yang demokratis untuk menciptakan daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kelembagaan dan sistem demokrasi turut memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing wilayah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem otonomi daerah menjadikan daya saing antarprovinsi sebagai isu strategis dalam pembangunan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu tujuan utama desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 yang disusun oleh BRIN, Provinsi Jawa Barat menunjukkan ketertinggalan pada beberapa pilar penting seperti infrastruktur, sistem keuangan, dan kapabilitas inovasi (Bardono, 2023). Padahal, dari sisi demokrasi, Jawa Barat menunjukkan skor yang tinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), berada di peringkat keempat secara nasional setelah DIY, DKI Jakarta, dan Bali (BPS, 2023). Kesenjangan antara kualitas demokrasi dan performa daya saing ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem demokrasi dalam mendorong kinerja pembangunan daerah.

Penelitian oleh Prasetyo dan Haryanto (2021) menunjukkan bahwa kualitas demokrasi berkontribusi positif terhadap efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang merupakan komponen penting dalam pilar institusi dan infrastruktur daya saing daerah. Selanjutnya, studi dari Maulana dan Nurhayati (2022) membuktikan bahwa dimensi kesetaraan dalam IDI berpengaruh signifikan terhadap pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di tingkat provinsi. Sementara itu, riset oleh Handoko dan Putri (2020) menyoroti bahwa partisipasi politik dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi variabel penentu dalam keberhasilan inovasi daerah. Ketiga studi ini menunjukkan adanya potensi hubungan antara kualitas demokrasi dan peningkatan pilar-pilar dalam IDSD.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung melihat IDI dan IDSD secara terpisah, penelitian ini mengusulkan model integratif untuk mengukur keterkaitan antara ketiga dimensi demokrasi (kebebasan, kesetaraan, kapasitas lembaga demokrasi) dan seluruh dua belas pilar daya saing daerah secara statistik. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana demokrasi dapat menjadi katalis pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan gagasan Dahl (2020) bahwa demokrasi yang sehat menyediakan mekanisme akuntabilitas dan partisipasi yang dapat mempercepat pembangunan institusional. Selain itu, pemetaan ini penting mengingat rekomendasi terbaru dari OECD (2022) yang menekankan pentingnya tata kelola demokratis dalam

mendukung inovasi publik. Dengan menyoroti konteks Jawa Barat sebagai salah satu provinsi besar dengan demokrasi relatif baik namun daya saing yang belum optimal, penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dan praktis yang relevan (OECD, 2022; BPS, 2023; BRIN, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi-dimensi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terhadap dua belas pilar dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Provinsi Jawa Barat. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi dimensi demokrasi mana yang paling signifikan dalam menjelaskan variasi kinerja daya saing daerah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai hubungan antara demokrasi dan pembangunan daerah melalui pendekatan kuantitatif integratif. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan daya saing berbasis demokrasi yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat provinsi, khususnya di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data IDI menggunakan arsip dataset yang tersedia pada situs Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rentang waktu 2021–2023 pada 34 provinsi dalam situs <https://www.bps.go.id/id>. Data IDSD dikumpulkan menggunakan arsip dataset dari 34 provinsi pada rentang waktu 2023 yang disediakan pada buku IDSD 2023 yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

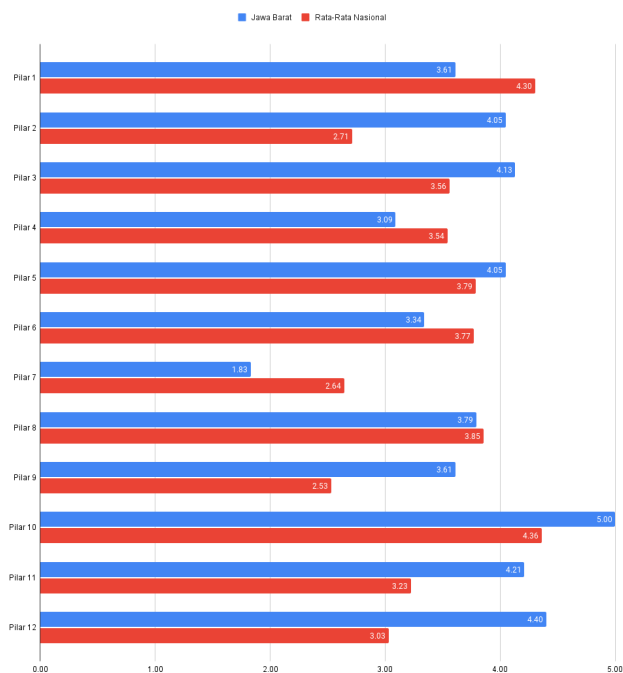
Dalam studi ini, kami akan menjelaskan bagaimana setiap dimensi variabel independen, yaitu IDI, dapat mempengaruhi setiap dimensi IDSD. Setelah peneliti melakukan analisis kuantitatif deskriptif dengan melalui uji korelasi bivariat, peneliti akan menjelaskan bagaimana terdapat hubungan antara dimensi IDI (kebebasan, kesetaraan, dan lembaga demokrasi) dan dimensi IDSD (pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5, pilar 6, pilar 7, pilar 8, pilar 9, pilar 10, pilar 11, dan pilar 12). Korelasi bivariat nantinya akan dianalisis untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dimensi IDI dan IDSD menggunakan hasil $r = .00 - .02$ (sangat lemah), $.02 - .04$ (lemah), $.04 - .07$ (sedang), $.07 - .09$ (tinggi), dan $.09 - .10$ (sangat tinggi). Peneliti juga menggunakan alat bantu berupa software SPSS versi 27 dan draw.io untuk menggambarkan keterhubungan dimensi IDI dan IDSD. Hasil analisis SPSS tersebut telah dilampirkan melalui lampiran di bagian akhir dokumen ini untuk mempermudah pemeriksaan dan verifikasi data.

Sebagai tambahan, data indeks yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala interval dan diasumsikan telah valid dan reliabel. Menurut Simkins & Peterson (2016), data sekunder berupa indeks, seperti IDI dan IDSD, telah melalui pengukuran reliabilitas, validitas internal, dan validitas eksternal saat dikumpulkan dan dianalisis oleh lembaga penelitian/survei penyedia. Validitas dan reliabilitas ini memberikan keunggulan dalam efisiensi, mengurangi beban biaya dan waktu bagi peneliti untuk melakukan pengujian tambahan pada data tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas secara terpisah, karena data indeks yang disediakan sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daya Saing Jawa Barat

Perbandingan pilar-pilar utama dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menunjukkan bagaimana performa daya saing Jawa Barat diukur dari berbagai aspek, termasuk institusi, stabilitas ekonomi, keterampilan, hingga efisiensi pasar tenaga kerja. Visualisasi data ini menggambarkan posisi Jawa Barat dalam kaitannya dengan rata-rata nasional, memperlihatkan kekuatan maupun area yang perlu ditingkatkan. Dari sini, dapat dianalisis lebih lanjut pilar-pilar yang menjadi tantangan utama bagi daya saing Jawa Barat, sekaligus area dimana peningkatan akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.



Grafik 1. Perbandingan Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah Jawa Barat dengan Indeks Daya Saing Daerah secara nasional

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Mengacu pada Grafik 1, dapat dilihat bahwa Jawa Barat memiliki ketertinggalan dalam pilar 1 (institusi), 4 (stabilitas ekonomi makro), 6 (keterampilan), 7 (pasar produk), dan 8 (pasar tenaga kerja) yang berada di bawah rata-rata IDSN. Ketertinggalan Jawa Barat dalam kelima pilar tersebut telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap daya saing Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Dalam pilar 1, lemahnya tata kelola pemerintahan Jawa Barat dalam mengefisienkan pelayanan publik, serta proses perizinan yang terlalu rumit dan berbelit-belit (*red tape*), menyebabkan Jawa Barat kehilangan peluang investasi pasar. Dalam hal ini, daerah dengan birokrasi yang jauh lebih efisien, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur akan lebih berpotensi untuk mendatangkan investor ke dalam daerahnya. Sama halnya dengan pilar 1 (institusi), pilar 4 (stabilitas ekonomi makro) juga memainkan peran penting dalam konteks daya saing daerah. Ketertinggalan Jawa Barat dalam aspek ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, serta

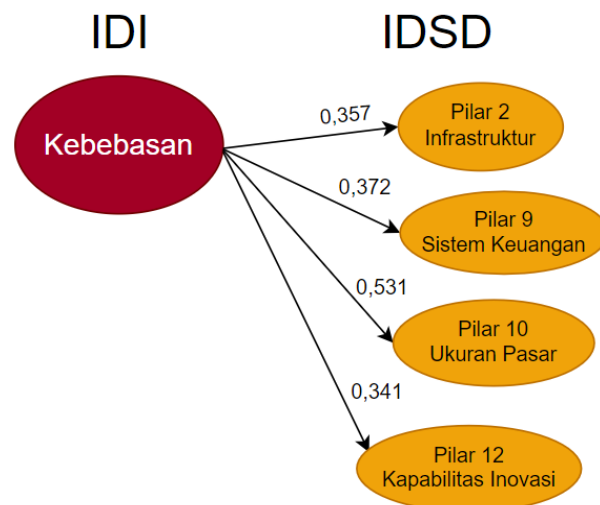
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, telah menunjukkan lemahnya produktivitas ekonomi Jawa Barat dan berakibat pada terhambatnya daya tarik investasi.

Keterampilan sebagai pilar 6 menunjukkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia dalam suatu daerah. Berdasarkan Grafik 1, Jawa Barat sendiri memiliki ketertinggalan dalam pilar 6. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat mencapai 8,83 tahun, yang masih berada di bawah RLS daerah lain, seperti DKI Jakarta yang mencapai 11,45 tahun dan D.I. Yogyakarta yang mencapai 9,83 tahun (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini telah menunjukkan bahwa Jawa Barat mengalami ketertinggalan dalam aspek tenaga kerja yang terampil, sehingga dapat mengurangi produktivitas dan inovasi daerahnya dibandingkan dengan daerah lain seperti DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta.

Jika kembali melihat Grafik 1, rata-rata IDSD Jawa Barat dalam pilar 7 mengalami ketertinggalan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,81 poin dibandingkan rata-rata IDSN. Pilar 7 sendiri mencerminkan efisiensi dan dinamika pasar produk suatu daerah yang diukur melalui tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa. Di Jawa Barat, pasar didominasi oleh perusahaan dalam sektor manufaktur, seperti perusahaan tekstil, garmen, hingga farmasi. Tingginya dominasi pasar ini, akan menghambat persaingan sehat dan menghambat UMKM untuk berkembang, karena proses birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya akses pemberian modal terhadap UMKM. Kebalikannya, tidak seperti pilar 7, rata-rata IDSD Jawa Barat dalam pilar 8 (pasar tenaga kerja) memiliki ketertinggalan yang kurang signifikan, yaitu sebesar 0,06 poin dibandingkan rata-rata IDSN. Meski ketertinggalannya terpaut sangat kecil, hal ini tetap mempengaruhi daya saing daerah Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Hubungan Kebebasan terhadap Daya Saing Daerah (2, 9, 10, 12)

Hubungan antara aspek kebebasan dan pilar-pilar daya saing menunjukkan keterkaitan yang signifikan terhadap perkembangan infrastruktur, sistem keuangan, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi suatu daerah. Visualisasi berikut memberikan gambaran tentang bagaimana kebebasan, yang mencakup kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat, berdampak pada berbagai elemen yang membentuk daya saing daerah. Dengan memanfaatkan kebebasan secara positif, daerah dapat menarik lebih banyak investasi, memperluas pasar, dan mendukung lingkungan yang kondusif bagi inovasi serta kolaborasi.



Gambar 1. Hubungan Kebebasan terhadap Daya Saing Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024). *Diolah oleh penulis melalui SPSS dan Draw.io*

Berdasarkan Gambar 1 mengenai hubungan kebebasan terhadap daya saing daerah, ditemukan korelasi pada pilar 2 (infrastruktur), pilar 9 (sistem keuangan), pilar 10 (ukuran pasar), dan pilar 12 (kapabilitas inovasi). Hubungan kebebasan dengan infrastruktur memiliki nilai korelasi 0,357 yang menandakan adanya hubungan yang lemah dengan asosiasi yang rendah pula. Kebebasan dalam berbagai aspek seperti berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, dibuktikan dengan negara-negara asing seperti Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang melirik infrastruktur di Jawa Barat. Bebasnya negara-negara asing datang dan berdialog dengan pemerintahan daerah Jawa Barat, akan membuka kesempatan bagi investor untuk menanam modal dalam pembangunan infrastruktur daerah. Jika digunakan secara efektif dan efisien, dana yang memadai tentu akan menghasilkan keluaran yang baik pula guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek mobilitas dan aksesibilitas. Pemerintah daerah Jawa Barat menyambut para calon investor asing dengan baik, harapannya mereka dapat berinvestasi untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan jalan tol Cileunyi-Rajapolah (Bappeda Jabar, 2014). Selain adanya kebebasan investasi, kebebasan berpendapat juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur Jawa Barat. Masukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menciptakan pengadaan infrastruktur yang lebih baik dan tepat sasaran dalam kalangan masyarakat. Infrastruktur memainkan peran penting dalam daya saing daerah karena daerah yang memiliki kemudahan aksesibilitas umumnya dapat mempercepat lajunya roda perekonomian sehingga daerahnya dapat lebih berdaya saing.

Ada pula hubungan kebebasan dengan sistem keuangan memiliki nilai korelasi 0,372 yang menandakan adanya hubungan yang lemah dan asosiasi yang rendah. Meski begitu, terdapat pengaruh yang dapat kita lihat secara nyata dimana kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai indikator utama dalam dimensi kebebasan IDI dapat mendorong berbagai afiliasi bisnis dan komunitas ekonomi di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan

meningkatnya jumlah UMKM yang tergabung ke dalam asosiasi bisnis seperti, HIPMI dan KADIN Jawa Barat. Dengan adanya kebebasan berserikat, telah memungkinkan terbentuknya asosiasi tanpa hambatan, yang mana akan berdampak secara signifikan terhadap sistem keuangan Jawa Barat itu sendiri. Jika dikaitkan dengan skala nasional, pemerintah Indonesia melalui program Kartu Prakerja telah berusaha untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan inklusi keuangan, sehingga berdampak pada meningkatnya individu yang dapat berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan. Melalui program ini, 89% masyarakat yang diberikan kebebasan dalam mengakses berbagai program yang disediakan, telah merasakan dampak yang signifikan seperti, meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing. Maka dari itu, penting bagi daerah untuk mengutamakan aspek kebebasan untuk menciptakan stabilitas dan dinamisme sistem keuangannya. Ketika masyarakat diberikan kebebasan untuk berekonomi, berinvestasi, dan berpartisipasi aktif dalam pasar modal, maka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dapat tercapai.

Kebebasan dan ukuran pasar memiliki hubungan yang cukup tinggi dengan nilai korelasi 0,531. Kebebasan mempengaruhi ukuran pasar karena semakin bebas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, politik, dan sosial maka semakin besar pula potensi pertumbuhan pasar. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi. Dalam konteks ekonomi, kebebasan memperluas ruang lingkup partisipasi pasar, baik melalui kebijakan yang lebih transparan maupun keterbukaan terhadap arus investasi. Kondisi ini menarik pelaku usaha untuk beroperasi dengan lebih efisien dan produktif yang pada akhirnya akan memperluas ukuran pasar.

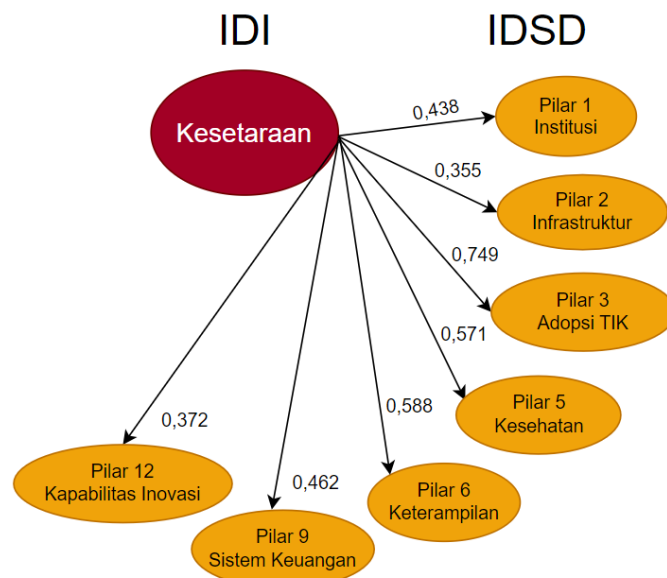
Kebebasan juga ternyata mempengaruhi kapabilitas inovasi dengan nilai korelasi 0.341 yang menunjukkan hubungan lemah dan asosiasi yang rendah. Korelasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kebebasan dalam bentuk hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, berperan dalam memperkuat ekosistem yang mendukung inovasi, tetapi dampaknya tidak terlalu signifikan. Kapabilitas inovasi memerlukan lingkungan yang tidak hanya terbuka terhadap ide-ide baru tetapi juga kondusif untuk kolaborasi lintas sektoral, kreativitas, dan kemampuan daerah dalam memanfaatkan keragaman perspektif untuk menghasilkan solusi inovatif. Meskipun kebebasan berkumpul dan berpendapat dapat mendorong diskusi yang sehat dan konfrontasi ide yang konstruktif, tingkat korelasi yang rendah menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah yang proaktif, mungkin lebih berperan dalam memaksimalkan kapabilitas inovasi suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan menjadi landasan penting bagi iklim inovasi, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara kebebasan politik dan kapasitas daerah dalam memfasilitasi transformasi ide-ide kreatif menjadi produk atau jasa yang bernilai tambah. Dengan demikian, untuk memperkuat daya saing melalui inovasi, kebijakan harus tidak hanya mendorong kebebasan tetapi juga secara aktif mendukung ekosistem inovasi yang holistik dan inklusif.

Dari berbagai perspektif yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan demokrasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan daya saing suatu negara atau daerah. Kebebasan politik dan sipil yang pasti dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan inklusif, mendukung pengembangan infrastruktur, serta memperkuat sistem keuangan melalui perlindungan hak kepemilikan dan regulasi yang stabil (Ahmed et al., 2024). Selain itu, demokrasi secara signifikan mendorong kapabilitas inovasi melalui kebijakan yang mendukung kreativitas, riset, dan adopsi teknologi.

Melalui hubungan erat antara demokrasi dan pilar-pilar daya saing seperti infrastruktur, sistem keuangan, ukuran pasar, dan inovasi; demokrasi terbukti menjadi landasan penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip demokratis yang kuat dapat menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan daya saing, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang (Hussain et al., 2021).

Hubungan Kesetaraan terhadap Daya Saing Daerah (1, 2, 3, 5, 6, 9, 12)

Analisis kesetaraan sebagai dimensi daya saing mengungkapkan keterkaitan yang signifikan dengan berbagai pilar seperti institusi, infrastruktur, kesehatan, keterampilan, dan adopsi teknologi informasi. Visualisasi di bawah ini menggambarkan hubungan antara kesetaraan dan elemen-elemen daya saing, yang memperlihatkan bagaimana peningkatan dalam aspek kesetaraan berpotensi memperkuat kapasitas pembangunan di berbagai sektor. Hubungan ini menunjukkan peran penting kesetaraan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi serta sosial.



Gambar 2. Hubungan Kesetaraan terhadap Daya Saing Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024). *Diolah oleh penulis melalui SPSS dan Draw.io*

Dimensi IDI yang kedua adalah kesetaraan. Berdasarkan analisis yang telah kami buat, kesetaraan memiliki hubungan yang signifikan dengan beberapa pilar-pilar IDSD. Kesetaraan memiliki hubungan dengan institusi dengan nilai korelasi 0,438 yang menandakan adanya hubungan dan asosiasi yang cukup kuat. Aspek kesetaraan yang sedang menjadi perbincangan hangat pada *status quo* adalah isu kesetaraan gender. Dalam institusi, kesetaraan gender masih perlu menjadi perhatian, terutama aspek partisipasi dalam institusi pemerintahan. Di Jawa Barat, partisipasi perempuan dalam parlemen DPRD baru mencapai 22,5% (Zulkhairil, 2024). Keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu akan membawa dampak signifikan bagi kesetaraan gender di Jawa Barat, salah satunya adalah menciptakan peraturan daerah yang lebih responsif gender. Institusi yang mengedepankan kesetaraan akan memiliki tingkat kepercayaan masyarakat

yang lebih tinggi untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan yang kuat terhadap daerah Jawa Barat. Daerah ini menghadapi masalah yang cukup rumit dalam hal kesetaraan gender. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Forum Pengadaan Layanan (FPL), Jawa Barat tercatat sebagai daerah tertinggi pada 2023 dalam jumlah perempuan korban kekerasan yaitu sebanyak 3.901 kasus (Muhamad, 2024). Memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam institusi dapat menekan tingkat kekerasan dengan membuat dan melaksanakan peraturan daerah yang kohesif dan komprehensif guna menyadarkan mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, kesetaraan dengan infrastruktur yang memiliki nilai korelasi 0,355 dengan interpretasi hubungan dan asosiasi yang lemah. Dimensi kesetaraan mampu mempengaruhi infrastruktur di daerah secara signifikan, melalui akses terhadap sumber daya dan layanan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan, yang mana masih banyak sekali daerah-daerah tertinggal. Daerah tertinggal ini kerap kali mendapatkan diskriminasi akses terhadap sumber daya dan layanan, yang berakibat pada lemahnya daya saing terhadap daerah lain. Dalam konteks ini, isu yang kerap kali muncul adalah kualitas infrastruktur jalan. Beberapa daerah yang cukup terbelakang maju, seperti Jawa Barat juga masih mengalami isu ini. Berdasarkan Informasi Statistik Infrastruktur 2022, Jawa Barat sendiri belum sepenuhnya bisa mencapai kondisi jalan nasional yang mantap. Jawa Barat menduduki posisi 25 dari 34 Provinsi dalam konteks kondisi jalan nasional yang mantap. Hal ini, telah menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Jawa Barat guna mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah.

Kesetaraan memiliki hubungan yang tinggi dan asosiasi yang kuat dengan adopsi TIK, nilai korelasinya mencapai 0,749. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesetaraan di suatu wilayah, semakin besar adopsi TIK yang terjadi. Kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, dan layanan publik memungkinkan lebih banyak individu dan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.

Ketika kesetaraan meningkat, hambatan seperti kesenjangan gender, diskriminasi sosial, atau ketidaksetaraan ekonomi cenderung menurun, sehingga akses terhadap teknologi menjadi lebih inklusif. Adopsi TIK yang merata juga berarti kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau di wilayah terpencil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi ini.

Hubungan lainnya adalah kesetaraan dengan kesehatan. Nilai korelasinya 0,571 yang dapat kita interpretasikan bahwa ada hubungan yang cukup tinggi dan kuat terhadap dua dimensi ini. Partisipasi yang inklusif dalam proses politik memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih adil untuk sektor kesehatan, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar dan kebijakan publik yang berfokus pada kesehatan preventif dan promotif. Keterlibatan aktif warga negara dalam penyusunan kebijakan juga menciptakan akuntabilitas pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan dan infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup serta kesehatan bayi dan ibu. Daerah dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi di Jawa Barat juga menunjukkan angka kesehatan masyarakat yang lebih baik dibandingkan daerah dengan partisipasi yang lebih rendah, menandakan peran signifikan dari kesetaraan politik terhadap pembangunan kesehatan

regional. Selain itu, aksesibilitas layanan kesehatan yang didukung oleh kebijakan inklusif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, memperkuat dimensi kesetaraan dalam IDI dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas pilar kesehatan dalam IDSD, khususnya di wilayah-wilayah seperti Jawa Barat.

Selanjutnya, kesetaraan dan keterampilan dengan nilai korelasi 0,588 yang memiliki hubungan dan asosiasi yang cukup kuat. Kesetaraan melingkupi anti monopoli sumber daya ekonomi. Dengan persamaan kesempatan bagi seluruh pelaku ekonomi terkhususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan memicu masyarakat yang semakin terampil. Terjadinya pasar persaingan sempurna akan mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan berkolaborasi, guna mewujudkan hal ini, maka mereka harus terus melatih keterampilan dan spesialisasi agar dapat masuk dan bertahan dalam pasar. UMKM disebut-sebut sebagai “mesin utama” dalam membangkitkan ekonomi nasional. Pemerintah Jawa Barat menunjukkan dukungannya terhadap UMKM dengan menargetkan 2.2 juta UMKM di Jawa Barat mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Usaha ini dilakukan agar tidak adanya satu perusahaan besar yang memonopoli perekonomian Jawa Barat.

Kesetaraan juga memiliki hubungan dengan sistem keuangan, nilai korelasi 0,462 dapat kita interpretasikan bahwa ada hubungan yang cukup kuat dan tinggi antara kedua dimensi ini. Aspek kesetaraan yang menjadi permasalahan mendasar jika dikaitkan dengan sistem keuangan saat ini adalah kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar. Dalam hal ini, kemudahan akses terhadap pelayanan dasar seperti penggunaan digital banking dan e-wallet, jaringan, serta layanan perbankan akan lebih sering ditemukan di kota-kota yang besar. Daerah-daerah kecil atau perdesaan kerap kali mengalami diskriminasi terhadap akses pelayanan dasar tersebut. Hal ini, tentu akan berdampak buruk kepada berbagai golongan, khususnya UMKM di daerah rural. Dampak paling signifikan yang akan dialami UMKM mencakup kesulitan dalam mendapatkan akses modal, biaya transaksi yang lebih tinggi, dan ketergantungan pada layanan keuangan informal. Dengan begitu, sudah menjadi fokus pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan infrastruktur digital di wilayah rural, serta mengembangkan inovasi layanan keuangan yang dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani.

Terakhir, kesetaraan dengan kapabilitas inovasi yang memiliki hubungan dan asosiasi yang rendah dengan nilai korelasi 0,372. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan yang diukur melalui IDI memiliki keterkaitan dengan kapabilitas inovasi yang diukur melalui IDSD, meskipun tidak terlalu kuat. Kesetaraan dalam partisipasi politik dan akses terhadap hak-hak dasar penting bagi stabilitas sosial, dampaknya terhadap kapabilitas inovasi di Jawa Barat cenderung terbatas. Faktor-faktor seperti infrastruktur, teknologi, investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), serta keterampilan tenaga kerja memainkan peran yang lebih dominan dalam mendorong inovasi. Oleh karena itu, inovasi membutuhkan dukungan kebijakan khusus pendidikan berbasis STEM dan fasilitas penelitian yang memadai agar kesetaraan dapat berperan lebih signifikan dalam meningkatkan kapabilitas inovasi.

Kesetaraan dalam demokrasi memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing Jawa Barat, terutama pada pilar-pilar seperti institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, dan kapabilitas inovasi. Demokrasi yang kuat dengan penekanan pada kesetaraan dapat mendorong penguatan institusi karena pemerintahan yang transparan dan akuntabel lebih mampu membangun lembaga-lembaga

yang efisien dan efektif. Hal ini juga berdampak pada peningkatan infrastruktur, di mana kebebasan politik dan partisipasi publik memungkinkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, adopsi TIK juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan demokratis yang inklusif, di mana akses teknologi didorong untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong inovasi. Sistem keuangan yang sehat juga berkembang lebih baik dalam demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan karena akses terhadap layanan keuangan lebih terbuka, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih merata (Hashemizadeh et al., 2023). Di Provinsi Jawa Barat, contohnya, kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang pada akhirnya mendukung daya saing daerah melalui peningkatan kapabilitas inovasi seperti pada Kabupaten Sukabumi yang membuka pendidikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja untuk menyiapkan kompetensi yang terbaik dan usaha pengurangan pengangguran (KDP Kota Sukabumi, 2023).

Demikian, kesetaraan dalam demokrasi memainkan peran penting dalam memperkuat pilar-pilar daya saing utama, baik melalui peningkatan infrastruktur, keterampilan, maupun inovasi. Di Jawa Barat, kebijakan yang mendukung kesetaraan akan mendorong kemajuan di berbagai sektor, menjadikan wilayah ini lebih kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

Hubungan Lembaga Demokrasi terhadap Daya Saing Daerah (1, 3, 5)

Peran lembaga demokrasi dalam mempengaruhi daya saing daerah mencakup aspek-aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang berdampak pada pilar-pilar daya saing, termasuk institusi, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kesehatan. Visualisasi berikut memberikan gambaran mengenai hubungan yang terbentuk antara kapasitas lembaga demokrasi dan ketiga pilar daya saing utama, menunjukkan bahwa demokrasi yang kuat dapat mendukung stabilitas institusional, mempercepat adopsi teknologi, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Dimensi IDI selanjutnya adalah lembaga demokrasi. Dimensi ini memiliki hubungan dengan beberapa dimensi IDSD, seperti institusi, adopsi TIK, dan kesehatan. Lembaga demokrasi memiliki hubungan dengan institusi, nilai korelasinya 0,374 yang dapat kita interpretasikan sebagai hubungan yang lemah. Meskipun hubungan lemah, tetap terdapat asosiasi yang signifikan. Institusi yang kuat merupakan fondasi bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mereka menyediakan regulasi yang transparan dan mencegah ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Dalam konteks ini, kapasitas lembaga demokrasi yang mencakup kualitas pemilu, transparansi lembaga politik, serta kinerja perwakilan politik menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan politik yang stabil dan mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan (Transparency International, 2021). Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi dan politik yang kompleks, memerlukan peningkatan dalam kapasitas lembaga demokrasi untuk memastikan bahwa proses politik berjalan secara transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat institusi-institusi daerahnya. Dengan demikian, perbaikan kelemahan dalam sistem demokrasi di tingkat lokal dapat secara langsung mempengaruhi daya saing daerah melalui penciptaan aturan main yang lebih jelas dan lingkungan investasi yang lebih aman. Keberlanjutan hubungan ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi lokal

bukan hanya persoalan politik semata, tetapi juga strategi peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Selanjutnya lembaga demokrasi dan adopsi TIK dengan nilai korelasi 0,579 yang menandakan adanya hubungan dan asosiasi yang cukup kuat antara kedua dimensi. Lembaga demokrasi meluiri pembahasan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Mengaitkan kinerja birokrasi dengan adopsi TIK, pemerintah pusat sendiri telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 30,5 triliun pada tahun 2021 untuk pengembangan TIK. Melalui percepatan perkembangan digital, pemerintah provinsi Jawa Barat menginisiasikan untuk dapat hadir bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik berbasis digital. West Java Digital Service (JDS) menjadi salah satu upaya digitalisasi di Jawa Barat untuk mendukung pelayanan publik dan pembuatan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif. Ada pula program desa digital untuk mendukung pengelolaan sampah terpadu (waste management) dan produksi kemasan ramah lingkungan (biodegradable) dengan berkolaborasi kepada berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi desa (Setyasih, 2022).

Terakhir, lembaga demokrasi dengan kesehatan yang memiliki hubungan serta asosiasi cukup kuat, ditandai oleh nilai korelasi 0,699. Lembaga demokrasi yang kuat memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik di seluruh sektor, salah satunya sektor kesehatan. Ketika pemerintah daerah menjunjung tinggi transparansi dalam menjalankan sistemnya, masyarakat akan lebih mudah untuk mengawasi kinerja dan penggunaan anggaran dalam sektor kesehatan, yang mana akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, sepanjang tahun 2023 DPRD Jawa Barat telah menghasilkan 12 perda terkait kesehatan dengan alokasi anggaran mencapai 12.5% dari APBD, yang mana telah menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat (2023) dan analisis Pusat Kajian Politik UI (2023), penguatan kelembagaan demokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja sektor kesehatan. WHO Indonesia (2023) dalam kajiannya juga menegaskan pentingnya tata kelola demokratis dalam meningkatkan outcomes kesehatan di tingkat daerah. Dengan begitu, penguatan lebih lanjut terhadap aspek kelembagaan, terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan, akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi kesenjangan yang masih ada.

Kapasitas lembaga demokrasi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama pada pilar institusi, adopsi TIK, dan kesehatan. Lembaga demokrasi yang kuat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang penting dalam menciptakan lingkungan institusional yang stabil dan dapat dipercaya. Hal ini berperan dalam membangun kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, meningkatkan iklim investasi, dan memastikan alokasi sumber daya manusia yang efisien untuk berkontribusi pada peningkatan daya saing ini.

Selain itu, kapasitas lembaga demokrasi yang baik berkorelasi erat dengan adopsi TIK. Sistem demokrasi yang terbuka memungkinkan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi sehingga meningkatkan efisiensi operasional baik di sektor publik maupun swasta (Liu & Wang, 2023). Kebijakan ini juga mendorong inovasi yang menjadi pilar penting dalam daya saing daerah. Terakhir, lembaga demokrasi dalam studi kasus Jawa Barat juga ternyata mempengaruhi indeks kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang transparan dan berbasis data lebih mungkin diterapkan oleh lembaga demokrasi yang

kuat. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya memperkuat daya saing secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan adanya hubungan signifikan antara tiga dimensi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan dua belas pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Dimensi kebebasan dalam IDI menunjukkan pengaruh terhadap pilar infrastruktur, sistem keuangan, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi. Sementara itu, dimensi kesetaraan berkontribusi terhadap pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, dan kapabilitas inovasi. Dimensi kapasitas lembaga demokrasi juga memiliki pengaruh terhadap pilar institusi, adopsi TIK, dan kesehatan. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan institusi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inovasi, dan pasar produk yang lebih efisien sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian hanya menggunakan data dari beberapa tahun terakhir tanpa mempertimbangkan dinamika temporal yang lebih luas, sehingga perubahan jangka panjang dalam hubungan antara dimensi IDI dan pilar IDSD mungkin tidak sepenuhnya tercakup. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada analisis korelasi tanpa menggali lebih dalam hubungan kausal antara variabel-variabel yang ada. Ketiga, penelitian ini juga terbatas pada konteks regional Jawa Barat, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke provinsi lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M., Khan, M. A., Attique, A., Khan, M. A., Haddad, H., & Al-Ramahi, N. M. (2024, Maret 15). Democracy's limited impact on innovation: Panel data evidence from developing countries. *PLOS*. Retrieved October 11, 2024, from <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0297915#sec001>
- Badan Pusat Statistik. (2020, Agustus 3). IDI Nasional 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI Nasional 2018. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/08/03/1756/idi-nasional-2019-mengalami-peningkatan-dibandingkan-dengan-idi-nasional-2018.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah - Tabel Statistik. *Badan Pusat Statistik*. Diakses pada September 30, 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi, 2021-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MCMY/-metode-baru-aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi, 2021-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MyMy/-metode-baru-indikator-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2020, Agustus 3). *Berita Resmi Statistik (No.36/08/76/Th. XIV)*. BPS Sulawesi Selatan
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). Mengukur Daya Saing Daerah melalui IDSD. *brin.go.id*. Diakses pada September 30, 2024 <https://brin.go.id/reviews/111362/mengukur-daya-saing-daerah-melalui-IDSD>

- Bappeda Jabar. (2014). Tiga Negara Lirik Infrastruktur Jawa Barat. <https://bappeda.jabarprov.go.id/tiga-negara-lirik-infrastruktur-jawa-barat/>. Diakses pada 10 Oktober 2024
- Bardono, S. (2023). Inilah 12 Pilar Indeks Daya Saing Daerah. <https://technologyindonesia.id/teknologi-a-z/umum/inilah-12-pilar-indeks-daya-saing-daerah/>. Diakses pada 30 Agustus 2024
- Dahl, R. A. (2020). *On Democracy*. Yale University Press
- Dinas Kesehatan Jawa Barat. (2023). *Profil Kesehatan Jawa Barat 2023*. Bandung: Dinkes Jabar
- Hashemizadeh, A., Ashraf, R. U., Khan, I., & Zaidi, S. A. H. (2023). Digital financial inclusion, environmental quality, and economic development: the contributions of financial development and investments in OECD countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 30, 116336–116347. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-30275-4>
- Hussain, M., Yahya, F., & Waqas, M. (2021). Does strong governance stimulate the effect of economic freedom and financial literacy on financial inclusion? A cross-country evidence. *Future Business Journal*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00090-9>
- KDP Kota Sukabumi. (2023, November 14). Penjabat Wali Kota Sukabumi Membuka Diklat Keterampilan bagi Pencari Kerja. *KDP Kota Sukabumi*. Retrieved October 11, 2024, from <https://kdp.sukabumikota.go.id/2023/11/diklat-keterampilan-bagi-pencari-usaha.html>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Informasi statistik infrastruktur PUPR 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku%20Informasi%20Statistik%20Infrastruktur%20PUPR%202022%20ISBN.pdf>. Diakses pada 11 Oktober 2024
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2019). Menteri Tjahjo Ungkap Tiga Alasan Pentingnya Daya Saing Bagi Sebuah Bangsa. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-ungkap-tiga-alasan-pentingnya-daya-saing-bagi-sebuah-bangsa>. Diakses pada 1 Oktober 2024
- Kementerian PPN Bappenas. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/146/undang-undang-nomor-23-tahun-2014>. Diakses pada 24 September 2024
- Liu, W., & Wang, J. (2023). Democracy, information, and communication technology infrastructure and environmental quality. *Environmental Science and Pollution Research*, 30, 105259–105274. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-29850-6>
- Muhamad, N. (2024). Jawa Barat, Provinsi dengan Kasus Kekerasan Perempuan Terbanyak 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66bb2f5aa2392/jawa-barat-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-perempuan-terbanyak-2023>. Diakses pada 10 Oktober 2024
- Ontowirjo, B., et al. (2024). *Indeks Daya Saing Daerah 2023*. Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. <https://penerbit.brin.go.id/others/catalog/view/1036/923/20624>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Competitiveness and the Role of Government*. Paris: OECD Publishing

- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2023). *Demokrasi dan Tata Kelola Kesehatan: Studi Kasus Jawa Barat*. Jakarta: PUSKAPOL UI
- Setyasih, T. E. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Papatung*, 5(3)
- Simkins, T., & Peterson, M. (2016). Assessing the value of a societal-level sustainability index for macromarketing research. *Journal of Macromarketing*, 36, 78–95. <https://doi.org/10.1177/0276146715586834>
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report*. Geneva: World Economic Forum
- World Health Organization. (2023). *West Java Health System Review 2023*. WHO Regional Office for South-East Asia
- Zulkhairil, A. (2024). Kesetaraan Gender di Jawa Barat Masih Belum Tercapai. <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/kesetaraan-gender-di-jawa-barat-masih-belum-tercapai?page=all>. Diakses pada 10 Oktober 2024